

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang diakibatkan oleh virus corona (covid-19). Pandemi covid-19 berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada sistem perekonomian dan sosial, baik individu maupun rumah tangga semua mengalami dampaknya, adapun dampak pada kesehatan menunjukkan angka kematian korban di indonesia mencapai 8,5 persen pada april 2020 dan dalam 24 jam terakhir data yang dihimpun hingga rabu,14 juli 2021 pukul 12:00 wib terjadi penambahan 54.517 kasus baru.Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian indonesia, yang dapat berakibat penurunan kesejahteraan masyarakat.Dalam pertumbuhan ekonomi beberapa lembaga ekonomi global memproyeksikan ekonomi melambat dibanding tahun 2019 dikisaran-0,4 persen hingga 2,3 persen menurun secara signifikan. Jika kondisi ini tidak cepat diantisipasi secara benar, maka diperkirakan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan sosial antar kelompok pendapatan akan menurun dan dapat menimbulkan disparitas antar wilayah baik perdesaan-perkotaan.

Menghadapi ancaman nyata dari pandemi covid-19, Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil kebijakan yang komperhensif di bidang fiskal. Melalui instruksi presiden Nomor 4 tahun 2020, Presiden Republik Indonesia mengarah seluruh Kementrian/Pimpinan, Gubernur/bupati/walikota mempercepat *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang dan jasa penanganan covid-19.

Selanjutnya Kementerian keuangan juga telah merealokasi dana APBN sebesar Rp. 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional dan honor-honor untuk penanganan dan pengendalian covid-19 termasuk perlindungan sosial (*social safety net*).

Seluruh pemerintah daerah di Indonesia juga melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang sama. Social safety net yang akan diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui beberapa program bantuan yang dibuat yang salah satunya yaitu Beras Untuk Keluarga Sejahtera (RASTRA) yang dibeli melalui program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dimasa pandemi ini.

Akan tetapi, Program perlindungan sosial yang disalurkan oleh pemerintah saat pandemi covid-19 ini tidak luput dari kekisruhan. Melalui pantauan media sosial twitter oleh Indef (2020), kebijakan jaring pengaman sosial banyak direspon dengan sentimen negatif oleh masyarakat dalam perbincangan di media sosial dengan topik yang paling populer mengenai pendapatan penerima bansos yang tidak merata dan salah sasaran.

Topik mengenai hal ini juga mewarnai pemberitaan di media massa lainnya. Imbas permasalahan data kemiskinan ini menyebar hingga keseluruhan pemerintah daerah bahkan hingga ke seluruh pemerintah daerah tingkat desa di Indonesia. Hal ini juga dialami oleh segelintir masyarakat di desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan yang merasa bahwa penerima program bantuan yang diberikan tidak tepat Sasaran. Informasi ini disampaikan langsung

oleh beberapa ibu-ibu warga desa aek loba yang merasakan krisis pangan karena wabah virus covid-19 ini.

Dalam mencapai tujuan program Rastra, semua tujuan dapat di capai dengan pelaksana penyalurannya. Program ini boleh dikatakan sudah efektif apabila tujuan dari program Rastra tercapai yaitu penyaluran bantuan berupa beras kepada rumah tangga miskin dan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu tindakan ini mengandung kriteria untuk mengukur efektivitasnya.

Pandemi covid-19 berdampak pada krisis ekonomi yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Akibat anjuran pemerintah yang melarang semua aktivitas di luar rumah harus di berhentikan. belum lagi Krisis ekonomi dan kenaikan harga-harga bahan pokok pada saat itu, berakibat pada pendapatan riil masyarakat menurun tajam. Hal ini berarti pula daya beli sebahagian masyarakat untuk memenuhi keutuhan dasarnya menjadi sangat rendah. Di samping itu propesi pengeluaran kelompok untuk pangan khususnya beras akan meningkat dan berdampak negative pada tingkat konsumsi khususnya energi dan protein. Akhirnya pemerintah mengatasi persoalan dengan melakukan transfer pendapatan melalui komoditas beras sehingga krisis ekonomi dan kenaikan BBM di harapkan dapat di perkecil.

Permasalahan yang telah lama dan hingga saat ini belum ada solusi yang nyata dalam penyelesaiannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah adalah masalah kemiskinan, bahkan seringkali hanya dijadikan sebagai objek dalam proses pembangunan,. Masalah kemiskinan juga merupakan salah satu persoalan

mendasar yang menjadi pusat perhatian di Negara manapun. Salah satu aspek untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat di percaya dan menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhataan pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat di gunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Masalah kemiskinan dapat dituntaskan apabila pemerintah melakukan kebijakan yang serius dan memihak kepada keluarga miskin. Namun seringkali kebijakan yang di buat justru kurang memihak kepada keluarga miskin, akibatnya kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan menyebabkan seorang yang tidak miskin menjadi miskin. Oleh karena itu, usaha penanggulangan kemiskinan memiliki penetapan kebijakan dan strategi serta arah yang jelas dalam penanganannya dan di dukung dengan program dan kegiatan yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.

Kementrian koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 tahun 2015, tentang komenko PKM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini di berikan untuk memenuhkan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.

Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam inpres Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar. Dan Program inonesia sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dunia usaha. Diantaranya dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan dan panduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Kondisi penduduk miskin di Desa Aek Loba kampung lalang kecamatan aek kuasan kabupaten asahan di hadapkan pada masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatas pemilik lahan banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, belum tercukupya layanan publik, degradasi sumber alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan hasil ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada pemerintah Kabupaten dan Kota. Juga di harapkan di ikuti dengan meningkatnya layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan otonomi dan memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di harapkan dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah akan mempercepat usaha penanggulangan pengurangan angka kemiskinan. Kabupaten Asahan pemerintahnya telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang sasarannya adalah penduduk miskin.



1	Kampung Lalang	384	13680	13.680	225	1000	10.00
	Jumlah	384	13680	13.680	225	1000	10.00

**Sumber: Kantor Kelurahan Aek loba tahun 2021**

Pada tabel di atas telah tertera realiasi penyaluran rastra di Desa Aek Loba Kampung lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan yang di ambil dari tahun 2020 -2021. Pada tahun 2020 alokasi rastra di Desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan sebanyak 13,680 Kg dengan RTM sebanyak 384 KK. Pada tahun 2021 alokasi rastra di Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan berkurang menjadi 10,00 kg dengan Jumlah RTM juga Berkurang 225 KK.

Titik distribusi berada di kantor desa Aek Loba Kampung Lalang itu sendiri.

Program rastra adalah program penanggulngan kemiskinan yang di dasarkan pada prinsip penghormatan, penghargaan, dan pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin. Namun dalam prakteknya di Desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten asahan masi banyak masalah yang harus dihadapi dalam melaksanakan program ini :

- a. Alokasi beras yang disediakan selalu tidak mencukupi kebutuhan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tercatat di Desa Aek Loba Kampung Lalang sehingga menyebabkan belum tercapainya jumlah beras yang di rekomendasikan sebanyak 15kg/KK/Bulan. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuan yang ada pada pedoman Umum Rastra. Penyimpangan

yang sering terjadi yakni tidak tepatnya jumlah beras yang di peroleh para Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Rastra, yang seharusnya Berdasarkan PAGU Rastra, setiap RTM penerima beras sejumlah 15 kg tetapi yang tidak di peroleh hanya sekitar 10 kg per RTM/RTS.

- b. Ketepatan data Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan belum di benahi sehingga menimbulkan peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM).
- c. Belum efektifnya pelaksanaan program beras sejahtera di kelembagaan di tingkat paling bawah yang akan menjamin ketepatan sasaran program. Karena masih banyaknya keluarga yang tidak seharusnya mendapatkan Rastra, tapi mereka dapat rastra tersebut.
- d. Sosialisasi dan transparansi kebijakan yang di ambil pemerintah tingkat bawah masih belum efektif. Kebijakan rastra belum berjalan sesuai dengan sasaran program.
- e. Tidak tepat waktu, penerimaan rastra tidak menentu kapan akan datang dan menimbulkan kebingungan pada masyarakat.
- f. Tidak tepat kualitas, Rastra yang di salurkan tidak berkualitas medium, berbau dan apek (Kantor Desa Aek Loba Kampung Lalang).

Meningkat besarnya nilai kajian pendistribusian Rastra ini bagi sebagian masyarakat terutama Rumah Tangga Miskin, maka penulis tertarik melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan program Raskin di Desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan kabupaten Asahan dan mengangkatnya dalam bentuk tulisan skripsi dengan Judul “**Analisis Efektivitas Distribusi Bansos**



## **Rastra Covid-19 di Desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu di rumuskan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini yaitu “Bagaimana efektivitas pendistribusian rastra pada masa pandemi di desa aek loba kampung lalang kecamatan aek kuasan kabupaten asahan”.

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini masih dalam ruang lingkup permasalahan dan dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penulis, maka dari itu penulis bertujuan untuk membatasi penelitian ini hanya pada masalah keefektivitasan pendistribusian bansos Rastra pada masa pandemi Covid-19 di desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

#### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian latar belakang masalah yang dibahas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah efektivitas distribusi program rastra di desa aek loba kampung lalang kecamatan aek kuasan kabupaten asahan?

2. Bagaimana keluhan masyarakat terhadap penyaluran Bansos di aek loba kampung lalang kecamatan aek kuasan kabupaten asahan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui efektivitas distribusi bansos Rastra di daerah penelitian.
2. Menyusun strategi kebijakan pemerintah desa aek loba kecamatan aek kuasan kabupaten asahan dalam mengatasi permasalahan penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Ekonomi dan studi pembangunan. Terutama yang berkaitan dengan ilmu kosentrasi kebijakan publik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran dan bahan masukan yang berguna bagi pemerintah desa aek loba kecamatan aek kuasan kabupaten asahan melalui informasi dan gambaran yang konkrit dan nyata tentang efektivitas distribusi bansos rastra.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi pada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. (Sadarmayanti, 2001:59) di tetapkan.

Efektivitas merupakan hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan dalam hal pencapaian tujuan. (Amin Tunggal widjaja, 2002:32)

Beberapa kriteria yang dapat di gunakan untuk menilai efektivits perencanaan, yaitu mencakup kegunaan, ketetapan dan objektifitas, ruang lingkup, efektifitas biaya, akuntabilitas, dan ketetapan waktu (T.Hani Handoko,2003:103) sedangkan gunawan dalam kamus besar bahasa indonesia (2003:113) menjelaskan bahwa efektifitas lebih bermakna pada hasil guna, yaitu hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pengertian yang di kemukakan di atas, efektivitas lebih menitik beratkan hasil dari pada kegiatan yang dilaksanakan. Jika kegiatan yang dilaksanakan berhasil ersebut dimaka kegiatan tersebut di katakan efektif. Pengertian yang sama juga di kemukakan oleh Kumorotomo Wahyudi (2005:105) efektivitas merupakan suatu pengukuran pada terhadap penyelesaian suatu

pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil tidaknya suatu pekerjaan itu dilakukan. Disini efektifitas di definisikan sebagai tolak ukur terhadap penyelesaian suatu pekerjaan, dapat di katakan mencapai efektifitas apabila pekerjaan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. (mahmudi, 2010:143)

Pengertian efektifitas juga di kemukakan oleh sigit soenardi (2003:2) efektifitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat tercapai. Efektifitas adalah suatu Kontinum yang menentang dari efektif. Pengertian ini hampir sama dengan pengertian efektifitas merupakan ukuran dari suatu pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan yang di lakukan dapat di katakan efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif.

Menurut effendi efektivitas adalah sebagai berikut : “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang di rencanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang di tetapkan dan jumlah personil di tentukan”, Effendi (2003:14). Sedangkan Sumardil Nyoman (2005:105) efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang ditetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluarga sesuai dengan apa yang diharapkan.

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Bila seseorang melakukan suatu dengan maksud tertentu dengan tujuan tertentu yang memang kehendaknya maka perbuatan orang tersebut di katakannya efektif jika menimbulkan efek atau pencapaian tujuan sebagai mana yang dikehendaki.

Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjangkakan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu. ( SP. Siagian, 2002:151)

Handyaningrat Suwarno juga (1990:16) juga mengungkapkan pengertian efektivitas. Menurut beliau efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Jelasnya, bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jad, jika tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentuka maka pekerjaan itu tidak efektif.

Efektivitas dapat di definisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan.

Sedangkan Septi ratminto (2005:179) mendefinisikan efektifitas “tujuan yang telah di tetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka waktu panjang, maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan itu harus pandangan yang sama menurut Peter F. Drucker yang di kutip H.A.S Moenir (2005:166) dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia yang mendefinisikan Efektifitas sebagai berikut :

- a. Efektifitas, pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan.
- b. Memperhatikan, pendapat tersebut, bahwa konsep efektifitas merupakan suatu konsep yang bersifat *multidimensional*. Artinya dalam mendefinisikan efektifitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang di miliki walaupun tujuan akhir dari efektifitas adalah pencapaian tujuan juga mengacu pada visi organisasi.

### **2.1.2 Pendekatan Efektivitas**

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000:23-36) Dalam Ali Muhidin (2009) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu:

- a. Pendekatan eksperimental (*Experimental Approach*).

Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum

tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sebanyak-banyaknya faktor dan mengisolasi pengaruh program.

b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal Oriented Approach*).

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajar dan praktis untuk desain pengembangan program. Pendekatan ini memberi petunjuk kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

c. Pendekatan yang berfokus kepada keputusan (*The Decision Focused Approach*).

Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistemik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program.

d. Pendekatan yang responsif (*The Responsive Approach*).

Pendekatan responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program. Evaluator menghindari suatu jawaban untuk suatu evaluasi progra yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakan secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui pandangan

orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami ihwal program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.

### **2.1.3 Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Keluaran (*output*) yang di hasil lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah dikualifikasi, maka pengukuran efektifitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektifitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) sering kali tidak dapat diketahui jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektifitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) yang dihasilkan baik, maka efektifitasnya akan baik pula, (Richard M.Steers,1985:46)

Efektivitas pelaksana program Raskin diukur dengan indikator 6 T (Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat administrasi). Yang setiap periode tertentu secara objek dievaluasi (Mendagri, 2007:4)

Keberhasilan raskin di ukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat (6 T) yaitu, Tepat sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi. (Pedoman Umum Penyaluran Raskin, 2013:16).

- a. Tepat sasaran : Penerima manfaat raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muksel Yang terdaftar dalam PDM-1
- b. Tepat jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.



- c. Tepat harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600.00 per kg nett di TD.
- d. Tepat waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran.
- e. Tepat kualitas : Terpenuhi persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras bulog.
- f. Tepat Administrasi : Terpenuhi persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

#### **2.1.4 Distribusi**

Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

Masalah pemilihan saluran distribusimerupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemiihan saluran distribusi dapat memperlambat usaha penyaluran barang atau jasa sampai ke tangan konsumen

Menurut philip kotler (2002:558) Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibatdalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi.

Menurut Chandra (2001:154) tujuan poko dari distribusi adalah menciptakan utilitas bagi pelanggan, adapun utilitas bagi pelanggan adalah sebagai berikut:

- a. Utilitas Waktu (*Time Utility*)
- b. Utilita Tempat (*Place Utility*)
- c. Utilitas Bentuk (*Form Utility*)
- d. Utilitas Informasi (*Information Utility*)
- e. Utilitas Kepemilikan (*Ownership Utility*)

distribusi merupakan ialah kegiatan yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat di konsumsi ([www.dikmenum.go.id](http://www.dikmenum.go.id) di akses pada tanggal 27 maret 2014) Yang termasuk dalam distribusi :

1. Distribusi pokok, adalah tugas-tugas yang mau tidak mau harus di lakukan :
  - a. Pengangkutan
  - b. pennjualan
  - c. Pembelian
  - d. Penyimpanan
  - e. Pembakuan standar kualitas barang
  - f. Penanggung resiko
  
2. Fungsi tambahan, yaitu di berlakukan pada distribusi barang-barang tertentu :
  - a. Menyeleksi
  - b. Mengepak/mengemas
  - c. Memberi informasi

Menurut Philip Kotler (1998:174) agar suatu penyaluran barang dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) maka pemakaian saluran pemasaran harus mampu melakukan sejumlah tugas penting yaitu :

- a. Penelitian
- b. Promosi
- c. Control
- d. Penyelarasan
- e. Negosiasi
- f. Distribusi fisik
- g. Pembiayaan
- h. Pengambilan resiko

Pengukuran efektivitas saluran distribusi diukur melalui sejumlah indikator-indikator pengukuran (El-Ansary dan Cooper dalam Bowersox et al, 1992) sebagai berikut:

- a. Kecukupan jumlah, tingkat kecukupan jumlah unit yang ingin diciptakan dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan.
- b. Waktu pengiriman, ketepatan serta kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan barang yang diperlukan.
- c. Kelengkapan item produk yang dibutuhkan oleh anggota saluran.

### **2.1.5 Kemiskinan**

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial ekonomi yang menjadi perhatian di dalam setiap negara. Hampir semua negara pasti menghadapi permasalahan

kemiskinan, hanya saja tingkat kemiskinan berbeda-beda di setiap negara. Masalah ini pun tak luput menghantui negara Indonesia. Kemiskinan adalah situasi serta kekurangan yang terjadi yang tak dikehendaki oleh miskin, melainkan karena tak bisa dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Kemiskinan pada dasarnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut (Bappeda Provinsi Riau 2004:5).

Pada negara-negara berkembang biasanya kegiatan pembangunan ekonomi ditujukan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dengan cara perbaikan-perbaikan pendapatan perkapita masyarakat dan perbaikan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi sangatlah penting di majukan untuk mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan secara menyeluruh (Michael P Tadaro, 2000:140).

Dalam TAP No.XVI/1998 Perlunya penerapan system perekonomian kerakyatan yang berpihak pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja karena ketertinggalan sektor ekonomi rakyat ini dari sektor ekonomi menengah dan besar, tapi juga karena ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial antara keduanya (miskin-kaya) sudah terlalu besar sehingga menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan sosial (Mubiyarto, 2000:243).

Kemiskinan merupakan masalah besar dalam pembangunan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan keterbelakangan sosial dan ekonomi. Yang kemudia meningkat menjadi ketimpangan sosial ekonomi pula. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi sehingga membuat mereka tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Selanjutnya untuk memberi pemahaman masalah kemiskinan konseptual, maka dapat di kemukakandua pengertian kemiskinan dilihat dari aspek kuantitatif.

Secara kualitatif kemiskina adalah suatu kondisi yang di dalamnya hidip manusia tidak “bermartabat manusia” atau dengan kata lain, manusia tidak layak dengan manusia. Secara kuantitatif kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan atau dengan bahasa yang lazim “tidak berharta benda”. (Ginanjar Kartasmania, 1998:3).

Kriteriayang digunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. BPS menetapkan suatu metode dalam menentukan penduduk miskin, yaitu dengan menentukan batas garis kemiskinan, di mana batas garis kemiskinan adalah penjumlahan batas minimum kebutuhan makanan (setara dengan 2100 kalori perkapita/perhari) dengan batas kecukupan komoditas non pangan (meliputi pertumbuhan, berbagai barangdan jasa, pakaian, dan barang tahan lama) yang dibedakan antara daerah kota dan pedesaan. (Badan Pusat Statistik, 2014).

Selain itu, pada pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 indikator yang digunakan dalam penentuan rumah tangga miskin yakni:

- a. Luas lantai Rumah
- b. Jenis lantai Rumah
- c. Jenis dinding rumah
- d. Fasilitas tempat buang air besar
- e. Sumber air minum
- f. Penerangan yang digunakan
- g. Bahan bakat yang digunakan
- h. Frekuensi makan dalam sehari
- i. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
- j. Kemampuan membeli makanan
- k. Lapangan kerja kepala keluarga
- l. Kepemilikan aset (Bada Pusat Statistik, 2005:26)

Indikator pada pendapatan social ekonomi ini di dasarkan pada pendekatan karakteristik rumah tangga, sehingga penentuan rumah tangga sampai pada data kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka.

Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan kekurangan dalam pemenuhan jumlah kebutuhan seperti makanan, minuman, rumah, kesehatan, pengetahuan, pendidikan dan akses terhadap informasi yang bermanfaat untuk mendapatkan sumber daya yang produktif dan sebagainya (Faisal Basri, 1995:198).

Dalam menegetahui profil kemiskinan, rumah tangga dan anggota rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok rumah tangga “miskin” dan “tidak miskin”:

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah rumah tangga yang konsumsinya tidak mencukupi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dinilainya diwakili oleh suatu garis kemiskinan.
- b. Rumah tangga tidak miskin adalah konsumsi perkepalanya di atas garis kemiskinan.

Garis kemiskinan yang dimaksud adalah batas atau aturan yang dibuat oleh BPS. Oleh karena itu, setiap negara dapat menentukan jumlah orang miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sampai saat ini, untuk menentukan jumlah orang miskin di Indonesia, digunakan indikator dari BPS (Moh, Arsad A, 1998:22)

Selain menjelaskan kriteria di atas, kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan dan pada dasarnya kemiskinan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative, Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Kemiskinan Absolut

seorang dikatakan miskin absolut, apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang digambarkan dengan garis kemiskinan tersebut, Kemiskinan subsistence didasarkan atas perkiraan income yang diperlukan untuk membeli makanan yang cukup untuk memenuhi rata-rata gizi bagi setiap orang dewasa dan anak-anak dalam satu keluarga (Keban Yeremias, 1999:8)

#### b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah perbandingan antara kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah di atas garis kemiskinan. Sehingga sebenarnya tidak termasuk miskin dibanding dengan masyarakat lain. Dengan ukuran pendapatan, Keadaan ini di kenal dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar golongan penduduk, antar sektor kegiatan ekonomi maupun ketimpangan antar daerah. Sebenarnya tidak termasuk miskin, tetapi lebih miskin dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain (Gunawan Sumodingrat, 1998:52).

Menurut N.Greogry Mankiw 2005:57, tingkat kemiskinan adalah presentase penduduk yang pendapatan keluarganya lebih kecil dari pada suatu angka absolute yang di sebut sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah suatu jumlah, angka atau tidak pendapatan absolut yang di tetapkan oleh pemerintah, dimana keluarga yang pendapatannya lebih kecil dari pada jumlah tersebut secara legal dinyatakan miskin. Oleh karena itu garis absolut merupakan suatu angka absolut, bukan suatu standar relatif, maka akan semakin banyak keluarga yang akan terdorong ke atas garis kemiskinan pada saat pertumbuhan ekonomi menaikkan pendapatan semua kelompok pendapatan secara keseluruhan.

Menurut Chambers Robert (1997) menyatakan inti dari masalah kemiskinan dan kesenjangan terletak pada “Deprivation Trip” atau perangkap/jebakan kemiskinan. Secara rinci perangkap kemiskinan terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu :

- a. Ketidak berdayaan
- b. Kerawanan



- c. Kelemahan fisik
- d. Kemiskinan
- e. Isolasi

Dari lima unsur tersebut, kerentanan dan ketidak berdayaan menjadi perhatian yang lebih serius karena akan menimbulkan roda penggerak kemiskinan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka menjadi miskin terpuruk di lembah kemiskinan. Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di bedakan dalam 2 (dua) faktor diantaranya:

- a. Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat atau kelompok masyarakat itu sendiri seperti orientasi nilai budaya dan sikap mental.
- b. Faktor eksogen adalah faktor yang berada di luar diri kelompok tersebut yang dapat dibedakan ke dalam aspek alamiah dan aspek buatan.

Masyarakat yang miskin pada umumnya lemah kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi. Pada akhirnya masyarakat miskin tersebut semakin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Kompetisi kian keras menurut masyarakat menggali segala potensi yang ada. Segala potensi yang ada di gunakan menggalakkan pembangunan serta pemerataan hasil-hasilnya.

Solusi agar orang miskin dapat keluar dari perangkap kemiskinan yaitu :

- a. Tujuan program pembangunan harus berpihak pada penduduk yang berpenghasilan rendah dan alokasi barang dan jasa di prioritaskan pada penduduk miskin.
- b. Melalui pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan penduduk bukan miskin dan penduduk miskin (Gunawan Sumodiningrat, 1998:12)

### **2.1.6 Program Raskin**

Pembangunan yang di galakkan oleh indonesia banyak sekali mencakup kegiatan yang beraneka ragam semua itu mempunyai maksud dan tujuan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat . perwujudan pembangunan itu seperti: Pelayanan, Kesehatan, Penyuluhan, Bantuan teknis, Penyedia kebutuhan pangan, air, listrik, jalan dan perumahan sampai dengan proyek-proyek yang tujuannya meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu perwujudan dari penyediaan kebutuhan adalah Program Rastra.

Program rastra adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus.kebijakan program rastra merupakan program dari bagian sistem ketahanan pangan nesioanl yang di laksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Tahun 2018 merupakan awal peralihan yang semula berupa pola subsidi menjadi pola bantuan sosial. Dengan demikian terdapat perubahan mendasar dalam pelaksanaanya, yaitu pada Bansos Rastra tidak terdapat harga/biaya tebus yang harus di bayar oleh keluarga penerima manfaat (KPM).Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra dulog atau subdulog adalah unit kerja dibawah dulog atau subdulog yang bertugas mengangkut

dan menyerahkan beras pelaksana distribusi. Rastra yaitu untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada jumlah yang telah ditentukan dan tingkat harga tertentu. (Winarni, 2012).

#### **2.1.6.1 Manfaat Program Beras Sejahtera (Rastra)**

Manfaat program beras sejahtera (Juknis pelaksanaan bansos rastra, 2018:3) sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
  2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (disalurkan tanpa biaya tebus) kepada KPM.
  3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
  4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
  5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dan menjaga stok pangan nasional.
- Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

#### **2.1.6.2 Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera Masyarakat**

Penerima manfaat Bansos Rastra adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos Rastra yang nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah

Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015.

DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Untuk setiap KPM, Daftar KPM Bansos Rastra paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

- a. Nama Pasangan Kepala Keluarga/Pengurus/Istri;
- b. Nama Kepala Keluarga
- c. Nama Anggota Keluarga Lainnya;
- d. Alamat Tinggal Keluarga;
- e. Kode Unik Keluarga dalam DT-PPFM; (Kementrian Sosial, 2017:16)

#### **2.1.6.3 Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Dari Titik Distribusi (TD) Ke Titik Bagi (TB) Sampai Ke (KPM)**

- a. Penyaluran Bansos Rastra dari TD ke TB sampai ke KPM menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penyaluran Bansos Rastra di TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Bansos Rastra dalam jumlah 10 kg setiap bulan.

- c. KPM menerima Bansos Rastra dari Pelaksana Distribusi di TD tanpa dikenakan biaya apapun.
- d. TB ditetapkan di lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM agar biaya transportasi yang dikeluarkan KPM untuk pengambilan Bansos Rastra dapat diminimalkan. TB dilengkapi dengan penanda tempat/lokasi penyaluran bansos Rastra.
- e. Untuk KPM berkebutuhan khusus (KPM lansia atau penyandang disabilitas), maka Pelaksana Distribusi ditingkat desa/kelurahan/pemerintahan setingkat didukung oleh Pendamping Sosial melakukan upaya aktif penyaluran Bansos Rastra sampai ke KPM.
- f. Pada saat penyaluran Bansos Rastra kepada KPM, Pelaksana Distribusi menyediakan formulir DPM-2 untuk ditandatangani oleh KPM yang menerima Bansos Rastra tersebut. Dokumen DPM-2 menjadi bukti realisasi penyaluran Bansos Rastra kepada KPM. Format DPM-2 terdapat pada Lampiran.
- g. Dokumen DPM-2 untuk setiap periode penyaluran Bansos Rastra dilaporkan oleh Pelaksana Distribusi kepada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial) dengan tembusan Tikor Bansos Pangan Kecamatan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota selanjutnya menyampaikan dokumen DPM-2 versi elektronik ( softcopy) setiap periode penyaluran kepada Kementerian Sosial paling lambat setiap akhir bulan berjalan. Hardcopy DPM-2 disimpan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

- h. Kementerian Sosial memberikan himbauan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlambat menyampaikan dokumen softcopy DPM-2.
- i. Dokumen DPM-1 dan DPM-2 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan/audit atas pelaksanaan Bansos Rastra.
- j. Dalam hal di TB terdapat Bansos Rastra 2 (dua) bulan atau lebih tidak tersalurkan kepada KPM yang terdapat dalam DPM-1, maka Pelaksana Distribusi melaporkan jumlah Bansos Rastra yang tidak tersalurkan kepada Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota (c.q. Dinas Sosial). Apabila memerlukan penggantian KPM, Tikor Bansos Pangan Kabupaten/Kota mengajukan usulan KPM melalui SIKS-NG untuk menerima Bansos Rastra yang tidak tersalurkan tersebut dengan persetujuan Kementerian Sosial sesuai dengan aturan penggantian KPM.
- k. Pemerintah Kabupaten / Kota bertanggung jawab untuk menyalurkan seluruh alokasi Bansos Rastra sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk setiap periode penyaluran. (Kementrian Sosial, 2017:24)

Adapun pelaksanaan jalannya program penyaluran rastra ini berlandaskan pada dasar hukum atau peraturan yang sah yaitu :

- a.UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- b.UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- c. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- d. UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN tahun Anggaran 2011
- e. UU No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
- f. Peraturan pemerintah No.7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perum Bulog
- g. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota.
- i. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- j. Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2011.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yaitu ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu yang logis dan di dukung oleh fakta empiris.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

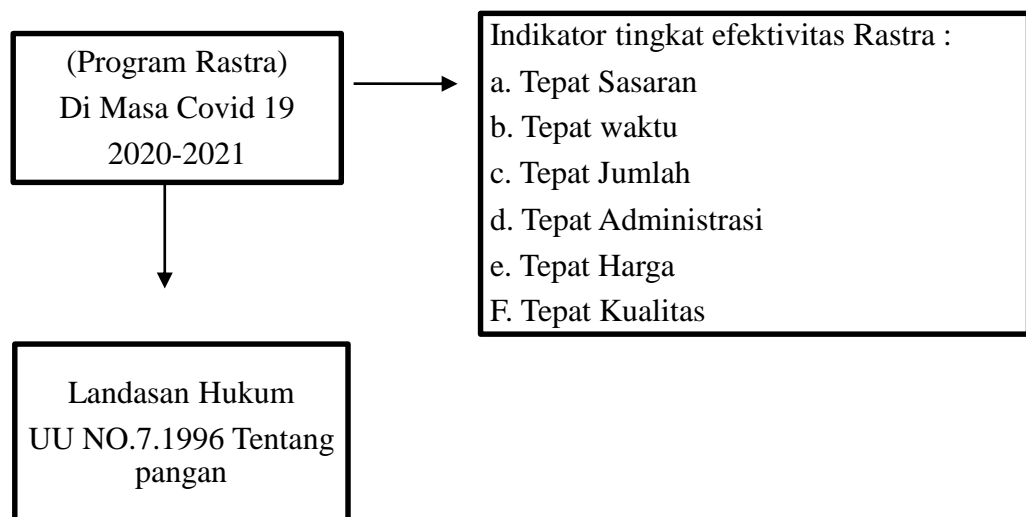
Nama peneliti/tahun	Judul penelitian	Metode	Hasil Penelitian
Nindya cahyani rosadi/2021	Efektivitas program bantuan sosial tunai (BST) pada masa pandemi covid-19 di perumahan taman cikande, jayanti tangerang.	Kualitatif	hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial sudah efektif atau sesuai dengan indikator efektivitas yang di gunakan .
Nugraha Fitria Ruhyana/2021	Strategikebijakan pemerintahan kabupaten sumedang dalam penyaluran bantuan sosial di masa	Probelm solving berdasarkan an studi literatur	Hasil penelitian mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial belum efektifitasdari segi ketepatanasaranpembagiannya.



	pandemi covid-19		
Siti Mardah, Erni Alfisah, Kumara Efrianti, Amalia Wahyuni/202 1	Peran perum bulog dalam stabilisasi beras masa pandemi covid-19 di banjarmasin	Kuantitati f	Peran perum bulog secara signifikan berpengaruh positif terhadap stabilisasi beras pada masa pandemic covid-19
Siti Muslimah/20 19	Implementasi kebijakan distribusi beras sejahtera (Rastra) di desa manah resmi kecamatan muara beliti kabupaten musi rawas	Kuantitati f	Implementasi distribusi RASTRA cukup berjalan dengan lancar
	Implementasi program beras sejahtera	Kualitatif deskriptif	Program beras sejahtera di desa sawakong belum sepenuhnya

	(RASTRA) di desa sawakong kecamatan galesong selatan kabupaten takalar		terimplementasi dengan baik, terlihat dari masi banyaknya masyarakat yang berhak menerima tapi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat dan pemerintah harus memperhatikan itu
--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Konseptual



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

$H_0$  = Efektifnya pendistribusian bansos rastra di masa pandemi Covid-19 Di Desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan.

$H_a$  = Belum Efektifnya Pendistribusian Bansos Rstra Di masa pandemi C0vid-19 Di desa Aek Loba Kampung Lalang Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan